

BAB II

KONDISI SOSIAL DAN EKONOMI BANJAR SEBELUM DAN AWAL PEMEKARAN TAHUN 1999 – 2003

2.1 Kondisi Sosial Masyarakat Banjar Sebelum Pemekaran

Manusia adalah makhluk sosial yang suatu keberadaannya diciptakan dalam sebuah acuan agar dapat berinteraksi sosial dengan sesama, karena dengan interaksi nantinya dapat menjadikan sebuah mekanisme yang bisa mendorong terciptanya suatu perubahan di masyarakat.¹⁸ Suatu perubahan dapat terjadi karena diakibatkan oleh adanya beberapa perubahan dalam struktur sosial, aturan-aturan baru, norma-norma dan juga suatu nilai-nilai disintegrasi.

Kota Banjar merupakan salah satu wilayah yang berada di Provinsi Jawa Barat. Sebelum melakukan pemekaran, wilayah ini masih tergabung atau masuk ke dalam wilayah Kabupaten Ciamis dan lingkungan pemerintahannya masih berupa kecamatan. Namun disisi lain Banjar ini memiliki keistimewaan tersendiri yaitu termasuk ke dalam Kota Administratif. Meskipun ruang lingkup Kota Administratif setingkat lebih tinggi dibandingkan kecamatan, Kota Administratif Banjar termasuk ke dalam wilayah dengan kategori kecamatan sedang bukan kecamatan besar, sehingga hal inilah yang kemudian kurang diperhatikan secara langsung khususnya dalam aspek pembangunan oleh Pemerintahan Kabupaten Ciamis. Rasa dan juga sikap pesimistis ditunjukkan oleh salah satu mantan Pelaksana Harian Walikota Banjar yaitu Dahlan, S.H. Beliau menyebutkan bahwa daerah Banjar semasa masih dibawah pemerintahan Kabupaten Ciamis kondisinya sangat berat, yang mana sarana dan juga prasarana pemerintahan, pendidikan, ekonomi, dan sarana pendukung lainnya, nyaris tidak ada, walaupun ada, itupun kurang berjalan dengan optimal, sehingga aspek pelayanan pemerintahan terhadap masyarakat menjadi terganggu dan kurang maksimal.¹⁹ Kesejahteraan masyarakat terdiri dari 3 (tiga)

¹⁸ Laver, H Robert. (1993). *Perspektif Tentang Perubahan Sosial*. Jakarta: Rineka Cipta

¹⁹ Undang Sudrajat (2013), *Banjar Satu Dekade Resep Manjur Kepemimpinan Dokter Herman*, (YAF Publish), hlm 53

unsur, yaitu kebutuhan terpenuhi, masalah terselesaikan, dan yang terakhir adalah kesempatan untuk maju terbuka.²⁰ Dengan kata lain, seseorang dapat dikategorikan hidupnya sejahtera bila kebutuhan utamanya telah terpenuhi, seperti contoh kebutuhan akan sandang, pangan, dan papan. Lalu kesejahteraan itu bisa dikatakan telah tercapai jika seseorang tersebut mampu menyelesaikan permasalahan yang sedang dihadapinya, dalam hal ini seseorang tersebut terbebas dari suatu kondisi yang mana masalah tersebut dapat menghalanginya dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Terakhir, agar bisa mencapai suatu kesejahteraan, seseorang harus memiliki sebuah peluang untuk bisa maju, dengan kata lain agar bisa memiliki suatu kehidupan yang sejahtera maka seseorang tersebut harus mendapatkan perlakuan dan juga persamaan peluang yang berkaitan dengan peningkatan kualitas dalam kehidupannya, seperti aspek pendidikan, lalu mendapatkan suatu pekerjaan dan peningkatan dalam kariernya.

Berdasarkan hasil penelusuran di lapangan, dengan cara wawancara dengan salah seorang warga masyarakat Kecamatan Langensari, beliau menyebutkan bahwa dulu segala bentuk proses administrasi harus ke wilayah Kantor pusat Kota Administratif Banjar yang sekarang menjadi Pendopo Walikota, warga masyarakat yang berada di pinggiran Banjar harus menempuh belasan kilometer agar bisa mendapatkan akses pelayanan yang dinilai pada saat itu cukup memadai atau cukup lengkap fasilitas nya. Begitu juga dalam aspek pelayanan publik lainnya, yaitu penerangan jalan umum. Jarang sekali terlihat di pinggir jalan ada penerangan jalan, padahal penerangan jalan ini cukup sentral posisi nya dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat di malam hari.” Kapungkur mah paroek. Aya alun-alun ge mung janten ngangon munding hungkul”. (Dulu disini gelap. Ada alun-alun juga hanya jadi tempat mandi kerbau)²¹.

²⁰ James Midgley, S.(2011) *Grassrooth Social Security Ind Indonesia: The Role Of Islamic Associations*. In M, Hosaka (Ed), Routledge

²¹ Wawancara Bapak Ato (48). *Warga masyarakat Kecamatan Langensari*. 21 April 2026

Berikut ini adalah data jumlah penduduk Kota Banjar dalam rentang Tahun 1999 – 2003 hasil dari data gabungan Badan Pusat Statistik Kabupaten Ciamis dengan Kantor Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kota Banjar :

Tabel 2.1 Jumlah pertumbuhan penduduk dalam rentang tahun 1999-2003

No.	Kecamatan	Tahun				
		1999	2000	2001	2002	2003
1.	Banjar	43.780	44.106	44.576	45.061	45.751
2.	Purwaharja	17.178	17.435	17.831	17.967	18.567
3.	Pataruman	45.720	46.056	46.545	47.203	48.058
4.	Langensari	44.678	44.870	45.293	45.412	46.487

Sumber : Kantor Badan Pusat Statistik Kabupaten Ciamis, dan Laporan Kantor Catatan Sipil Kependudukan dan KB Kota Banjar

Dari data tabel diatas terkait kependukan, warga masyarakat Kota Banjar dalam rentang tahun 1999 sampai dengan 2003 mengalami peningkatan yang cukup signifikan, bukan hanya satu atau dua kecamatan saja, akan tetapi semua kecamatan yang berada di Kota Admiistratif Banjar mengalami peningkatan jumlah penduduk yang terus menerus dari tahun ke tahun. Data tersebut diambil dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Ciamis, dan Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Banjar. Data tersebut menyebutkan bahwa seluruh Kecamatan yang ada di Banjar seperti, Kecamatan Banjar, Kecamatan Lagensari, Kecamatan Pataruman, dan juga Kecamatan Purwaharja mengalami peningkatan jumlah penduduk cukup pesat dibandingkan dengan 30 Kecamatan lainnya yang ada di Kabupaten Ciamis. Dengan jumlah rata -rata anggota keluarga mencapai 3,41% sehingga secara umum setiap keluarga memiliki tiga sampai empat orang anggota keluarga.

Meskipun demikian,jumlah persebaran penduduk untuk tiap kecamatan relatif sama. Ini bisa dilihat dari tingkat kepadatan penduduk per kecamatan. Kecamatan Banjar mencatatkan sebagai kecamatan dengan tingkat kepadatan penduduk paling tinggi (1.869/km²) dengan rata – rata jumlah penduduk per rumah tangga sebanyak empat orang, meskipun jumlah penduduk terbesar di Kota Banjar masih di pegang

oleh Kecamatan Purwaharja sebesar 48.058. Terdapat beberapa alasan yang melatarbelakangi Kecamatan Banjar mengalami kepadatan penduduk yang cukup tinggi dibandingkan dengan Kecamatan Purwaharja, yaitu karena pusat kegiatan ekonomi, tempat – tempat pendidikan dan juga hiburan mudah dijangkau. Namun semua itu, peningkatan jumlah penduduk tersebut tidak dibarengi dengan fasilitas pendukung lainnya yang memadai, seperti pelayanan pendidikan contohnya sekolah, pelayanan administrasi, aspek pelayanan Kesehatan contohnya puskesmas yang minim sarana dan prasarana yang memadai, dan juga segala bentuk aspek lain yang berkaitan dengan kebutuhan hidup manusia sangatlah kurang di Kota Banjar.

Ketika masih berada dalam ruang lingkup pemerintahan Kabupaten Ciamis, kondisi nya begitu memprihatinkan, karena minimnya perhatian pembangunan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis, hal inilah yang kemudian menjadi salah satu faktor terkendalanya mobilitas sosial di masyarakat Banjar. Aspek lain yang membuat Banjar tertinggal dari kecamatan-kecamatan lain yang ada di wilayah Kabupaten Ciamis adalah dalam segi infrastruktur, pendidikan, dan juga kurangnya akses lapangan pekerjaan, di tengah pertumbuhan jumlah penduduk yang begitu meningkat pesat di wilayah Kota Administratif Banjar (Kecamatan Banjar, Kecamatan Langensari, Kecamatan Purwaharja, dan Kecamatan Pataruman). Padahal jika dilihat dari segi geografis Banjar ini merupakan wilayah yang cukup strategis karena menjadi penyangga dua provinsi sekaligus yaitu Provinsi Jawa Tengah dan Provinsi Jawa Barat.

Masyarakat Banjar merupakan masyarakat yang cukup beragam akan budayanya. Seperti masyarakat yang berada di wilayah timur Banjar yaitu Kecamatan Langensari. Hal yang cukup menarik yaitu masyarakat nya dalam kegiatan sehari-hari menggunakan bahasa jawa, sedangkan wilayah yang berada di wilayah barat Banjar yaitu di Kecamatan Banjar masyarakat nya masih menggunakan bahasa sunda. Hal ini erat kaitannya karena, Kota Administratif Banjar ini merupakan salah satu daerah yang berbatasan langsung dengan Provinsi Jawa Tengah di bagian Selatan, lebih tepatnya yaitu Kecamatan Wanareja dan Kecamatan Dayeuhluhur Kabupaten Cilacap. Sehingga hal tersebutlah yang kemudian menciptakan interaksi sosial di masyarakat, dan uniknya kedua masyarakat ini menggunakan bahasa sunda

dan jawa sebagai bahasa sehari-hari, atau masyarakat menyebut bahasa tersebut dengan sebutan *Jawa Reang* atau *Jasun* (Jawa Sunda). Meskipun menggunakan dua bahasa yang berbeda atau tercampur antara bahasa sunda dengan bahasa jawa, hal ini tidak membuat interaksi diantara kedua masyarakat ini menjadi terganggu, mereka tetap beraktifitas seperti masyarakat pada umumnya. Proses berlangsungnya komunikasi dan juga kontak sosial dapat memunculkan akulturasi antara Suku Sunda dengan Suku Jawa.²²

Dalam segi kesehatan, Kota Administratif Banjar ini bisa dibilang lebih maju dibandingkan wilayah-wilayah lain yang berada di Kabupaten Ciamis. Alasan lebih maju dibandingkan dengan wilayah lain yang masih berada dalam Kawasan Kabupaten Ciamis ini, karena daerah ini mempunyai Rumah Sakit kelas c yang dapat menampung pasien dalam jumlah yang cukup besar. Rumah Sakit Umum Banjar ini juga bisa menyumbang Pendapatan Asli Daerah yang cukup tinggi setelah Pasar Banjar, yang masih berada di kawasan yang sama yaitu di Kecamatan Pataruman. Fasilitas-fasilitas yang ada di Rumah Sakit Banjar antara lain seperti ruang laboratorium, Rontgen, ruang Farmasi dan juga ruang gizi. Beberapa fasilitas tersebut terbilang cukup lengkap pada masanya. Selain fasilitas Rumah Sakit dengan kategori kelas c, Kota Administratif Banjar ini juga ditopang oleh beberapa fasilitas kesehatan lain, seperti Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas), untuk menunjang keperluan kesehatan bagi warga masyarakat Banjar dan sekitarnya. Jadi bukan hanya warga dari Banjar saja yang berobat ke Rumah Sakit ini, akan tetapi juga masyarakat yang berada di daerah penghubung seperti Kecamatan Wanareja di Kabupaten Cilacap, juga warga masyarakat yang berada di wilayah Kecamatan Parigi hingga sampai Kecamatan Pangandaran, jika memerlukan pengobatan yang cukup intensif bisa diarahkan ke Rumah Sakit Banjar dahulu sebelum dirujuk ke Rumah Sakit Kabupaten Ciamis ataupun Rumah Sakin Hasan Sadikin yang berada di Bandung, untuk perawatan yang lebih intensif dan juga peralatan kesahatan disana sudah termasuk paling lengkap.

²² Pranata, R. H., & Hartati, U. (2017). *Interaksi Sosial Suku Sunda dengan Suku Jawa* (Kajian Akulturasi dan Akomodasi di Desa Buko Poso, Kabupaten Mesuji). Swarnadwipa, 1-3

2.2 Kondisi Ekonomi Masyarakat Banjar Sebelum Pemekaran

Pembangunan ekonomi dapat diartikan juga sebagai sebuah serangkaian usaha dalam suatu perekonomian agar dapat mengembangkan kegiatan ekonomi sehingga nantinya infrastruktur menjadi lebih baik, perusahaan menjadi banyak sehingga hal ini bisa berdampak positif terhadap lapangan pekerjaan. Sebagai sebuah implikasi dari perkembangan ini diharapkan mampu menjadikan kesempatan kerja menjadi bertambah, dibarengi dengan pendapatan yang meningkat dan kemamuran masyarakat menjadi semakin tinggi.²³ Pemikiran terkait Pembangunan ekonomi selama ini cenderung memiliki ketergantungan dengan pertumbuhan ekonomi (*growth*). Suatu negara dapat dikatakan mengalami pertumbuhan ekonomi yang baik apabila GDP (*Groos Domestic Bruto*) negara tersebut meningkat, hal inilah yang kemudian menjadi salah satu indikator untuk mengukur sejauh mana perkembangan ekonomi. Indonesia merupakan salah satu negara yang menggunakan salah satu teori ini untuk mengukur pertumbuhan ekonomi.²⁴

Menurut Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah, menuntut agar pemerintah daerah untuk dapat melaksanakan desentralisasi dan juga dapat mengelola daerahnya secara mandiri sehingga nantinya dapat memacu sebuah pertumbuhan ekonomi daerah agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan suatu daerah tentu saja tidak dapat disamakan dengan pembangunan dengan daerah lainnya, karena di setiap masing – masing daerah memiliki potensi sumber daya yang berbeda – beda. Sumber daya tersebut seperti akumulasi modal, tenaga kerja dan juga sumber daya alam yang dimiliki.²⁵ Dengan perbedaan itulah yang kemudian setiap daerah mengalami perbedaan dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD). Untuk memacu Pendapatan Asli Daerah di suatu wilayah, pemerintah setempat harus menerapkan berbagai kebijakan terutama dalam sektor perekonomian agar nantinya pembangunan di daerah tersebut dapat segera terwujud. Maka dari itu pemerintah

²³ Sukirno. Sadono. (2006). *Ekonomi Pembangunan: proses, masalah, dan dasar kebijakan*, Jakarta: Prenada Media.

²⁴ Huda, Nurlan. (2015). *Ekonomi Pembangunan Islam*. Jakarta: Prenadamedia Group. hlm 8.

²⁵ *Op. Cit.* hlm. 16

harus datang dan mengecek langsung terkait potensi daerah nya. Penentuan sektor potensial ini atau sektor unggulan di daerah dapat juga dipengaruhi oleh sumber daya di daerahnya, baik itu potensi akan sumber daya alam, maupun sumber daya manusia.

Kota Banjar ini merupakan salah satu wilayah yang statusnya ditingkatkan menjadi Kota Administratif lalu kemudian menjadi daerah otonom baru yang ada di Provinsi Jawa Barat. Pada awalnya Kota Banjar ini merupakan salah satu Kecamatan yang ada wilayah Pemerintahan Kabupaten Ciamis, namun status nya ditingkatkan menjadi Kota Administratif, lalu kemudian melalui Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2002 yang diterbitkan oleh Kementerian Dalam Negeri menyatakan bahwa Pembentukan Kota Banjar di Provinsi Jawa Barat. Undang – undang tersebut disahkan di Jakarta pada tanggal 11 Desember 2002. Kota Administratif Banjar ini merupakan wilayah yang cukup strategis karena terletak di ujung timur Provinsi Jawa Barat yang berbatasan langsung dengan Provinsi Jawa Tengah, yaitu Kabupaten Cilacap. Kondisi tersebut berbanding terbalik jika diperhatikan dalam segi geografis, Kota Banjar merupakan salah satu daerah yang cukup strategis, dikarenakan wilayah ini menjadi penyangga antara Provinsi Jawa Barat dengan Provinsi Jawa Tengah.

Karakteristik ekonomi penduduk yang ada di wilayah perbatasan adalah terfokus ke dalam aktivitas ekonomi yang ada pada sektor pertanian, perkebunan, dan peternakan.²⁶ Kota Administratif Banjar terkenal akan pertumbuhan pertanian yang cukup pesat ketika masih berada di dalam Pemerintahan Kabupaten Ciamis. Tercatat dalam Badan Pusat Statistik Banjar bahwa di tahun 2003 luas lahan yang dipergunakan dalam kegiatan pertanian adalah sebesar 7, 882, 49 ha atau sekitar 59, 72 persen dari luas wilayah Kota Adminustratif. Maka dari itu dibutuhkan tempat dalam memasarkan hasil bumi untuk keberlangsungan perekonomian Kota Administratif Banjar mempunyai pasar yang tergolong cukup strategis, karena di pasar banjar inilah berbagai transaksi jual beli terjadi. Pembeli dan juga penjual yang ada di pasar banjar bukan hanya warga masyarakat banjar saja, akan tetapi terdapat

²⁶ I Gede Astra Wesnawa, (2017). *Karakteristik Ekonomi dan Sosial Budaya Masyarakat Dalam Pengelolaan Wilayah Perbatasan Darat Berbasis Nilai – Nilai Nyamabraya*. Jurnal Undiksha

masyarakat yang datang dari berbagai wilayah seperti Wanareja, Kabupaten Cilacap hingga Pamarican, Kabupaten Ciamis.

Meskipun lahan yang berada wilayah Kota Administratif Banjar ini merupakan sebagian besar merupakan lahan yang cocok digunakan untuk pertanian, namun ada pula masyarakat yang memanfaatkan laju mobilitas Banjar sebagai wilayah yang sering dijadikan tempat transit pendatang. Hal tersebut yang kemudian bisa mendatangkan sisi positif bagi masyarakat Banjar itu sendiri. Berdasarkan hasil penelusuran di lapangan, dengan cara wawancara penulis dengan salah seorang warga masyarakat Kecamatan Banjar, beliau menyebutkan bahwa dulu julukan “Daerah yang tak pernah tidur” sering disematkan oleh mereka para pendatang. Jadi bisa dikatakan mereka para pendatang, menjadikan Banjar ini sebagai tempat transit, baik mereka yang akan menginap di Banjar, ataupun hanya sekedar melepas penat, sebelum Kembali melanjutkan perjalanan mereka. “Kapungkur mah Banjar teh sok seuer nu nyebutkeun daerah nu can pernah sepi, aya we pendatang teh ti kota. Alhamdulillah aya sisi positif na, janten tiasa buka pendapatan kanggo masyarakat Banjar.” (Dulu wilayah Banjar ini banyak yang menyebutkan daerah ini sebagai daerah yang tidak tidur atau sepi, selalu ada pendatang dari kota berdatangan. Alhamdulillah bisa berdampak positif, bisa membuka lapangan usaha bagi masyarakat Banjar).²⁷

Ada pula sebagian warga masyarakat Kota Administratif Banjar ini yang masih menggantungkan hidupnya dalam sektor pabrik atau industri yang ada di wilayah Banjar ini. Menurut data dari Badan Pusat Statistik, sektor industri ini dapat dibedakan ke dalam empat golongan sektor yaitu, industri besar, industri sedang, industri kecil dan juga industri rumah tangga. Secara konsep industri dengan kategori besar adalah jika industri tersebut memiliki lebih dari 100 orang pekerja. Lalu ada industri dengan kategori sedang, mempunyai 20 sampai 99 orang pekerja, industri dengan kategori kecil hanya mempunyai mempunyai tenaga kerja sebanyak 5 sampai 19 orang, dan yang terakhir adalah industri dengan kategori rumah tangga adalah industri yang mempunyai tenaga kerja hanya kurang dari 5 orang. Industri di Kota

²⁷ Wawancara Heni (46). *Warga masyarakat Kecamatan Banjar*. 21 April 2026

Administratif Banjar sampai menjadi daerah otonom sendiri mempunyai beberapa industri besar dan sedang, dan tentunya hal ini sangat berdampak baik terhadap lapangan pekerjaan di Kota Administratif Banjar. Industri tersebut adalah Industri Penggilingan Padi, Tepung dan Pakan Ternak, Industri Makanan, Industri Pengolahan Tembakau, Industri Barang – Barang dari Kayu dan Barang Anyaman dari Rotan, Bambu dan sejenisnya, Industri Bahan Kimia, Industri Barang dari Plastik, Industri Pengolahan Tanah Liat, Industri Barang Logam, dan Jasa Pembuatan Barang dari Logam.

Berikut ini merupakan hasil data gabungan dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Ciamis dengan Badan Pusat Statistik Kota Administratif.

Tabel 2.2 Banyaknya Industri atau Perusahaan di Kota Banjar

No.	Jenis Industri	Banyak Industri
1.	Industri Penggilingan Padi, Tepung dan Pakan Ternak	1 Perusahaan
2.	Industri Makanan	1 Perusahaan
3.	Industri Pengolahan Tembakau	1 Perusahaan
4.	Industri Barang – Barang dari Kayu dan Barang Anyaman dari Rotan	1 Perusahaan
5.	Industri Bahan Kimia	1 Perusahaan
6.	Industri Barang dari Plastik	1 Perusahaan
7.	Industri Pengolahan Tanah Liat	4 Perusahaan
8.	Industri Barang Logam, dan Jasa Pembuatan Barang dari Logam	1 Perusahaan

Sumber :
Badan Pusat Statistik Kabupaten Ciamis dan
Badan Pusat Statistik Kota Banjar

Hasil tersebut diperoleh dengan cara menggabungkan data dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Ciamis (1999–2002) dengan data Badan Pusat Statistik Kota Banjar pada periode awal (2003) dapat disimpulkan bahwa, terdapat beberapa sektor industri yang masih menjadi tumpuan masyarakat Kota Administratif Banjar dalam mencari penghasilan. Industri paling banyak yang berada di Kota Administratif Banjar, yaitu industri yang bergerak dalam pembuatan proses tanah liat, seperti pembuatan genteng atau pun batu bata. Hasil dari proses pembuatan tanah liat, pada umumnya nantinya digunakan sebagai satu bahan untuk membuat rumah atau

hunian. Industri-industri ini tersebar ke dalam empat kecamatan yang berada di wilayah Kota Administratif Banjar. Seperti industri yang berada di kecamatan banjar yaitu industri pengolahan kayu, industri bahan kimia, industri logam dan industri pembuatan tanah liat ada dua Perusahaan. Lalu industri yang berada di wilayah kecamatan pataruman, ada industri plastik, dan yang terakhir ada industri pembuatan tanah liat satu Perusahaan. Lalu kecamatan pataruman ada industri pembuatan tanah liat satu perusaha, dan yang terakhir ada industri pembuatan makanan. Lalu ada kecamatan purwaharja ada industri pembuatan tanah liat satu Perusahaan, dan industri pembuatan logam. Dan yang terakhir, industri yang berada di wilayah kecamatan langensari adalah industri tembakau dan yang terakhir adalah industri pembuatan tanah liat.

Jika ditarik kesimpulan mengenai kegiatan ekonomi yang ada di masyarakat Kota Administratif Banjar dalam rentang tahun 1999 sampai dengan 2003, yaitu pada masa awal peningkatan status dari yang semula Kota Administratif menjadi daerah otonom baru, bahwa terdapat beberapa macam jenis aktifitas ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat Banjar. Walaupun Kota Administratif Banjar ini lahan yang digunakan sebagian besar dipergunakan untuk lahan pertanian, namun ada pula masyarakat yang menggantungkan hidupnya ke dalam beberapa sektor ekonomi, seperti industri, perdagangan, buruh dan juga perdagangan. Hal tersebut yang kemudian diharapkan bisa menjadikan masyarakat Banjar ini mampu berdiri secara mandiri, di tengah segala keterbatasan dan juga kekurangan yang ada.

2.3 Momentum Otonomi Daerah dan Lahirnya Kota Banjar

Terdapat beberapa alasan daerah melakukan pemekaran dari daerah induknya, yaitu antara lain ;

- a) Kesenjangan pendapat anatar daerah – daerah besar,
- b) Kesenjangan Investasi
- c) Pendapatan daerah dikuasai oleh pusat
- d) Pemusatan industri akbat kebijaksanaan investasi dan birokrasi serta infrastruktur.

e) Melebar kesenjangan regional akibat adanya ketimpangan alokasi kredit.²⁸

Dalam sebuah wawancara penulis dengan salah satu pendiri terbentuknya Kota Banjar sekaligus juga walikota pertama yaitu, Dokter Herman Sutrisno, beliau menyebutkan bahwa momentum terbentuknya Banjar yaitu dengan keluarnya Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Isi dari pasal tersebut yang menjadikan sebuah momentum awal bagi warga dan sejumlah tokoh di Banjar agar lebih gencar dan juga mendesak untuk ditingkatkan status menjadi Kota/Kabupaten. Isi dari pasal tersebut terdapat klausul yang menyebutkan bahwa jika tidak mengalami peningkatan status maka status Kotif Banjar akan kembali dilebur dan menjadi salah satu wilayah kecamatan di bawah Kabupaten Ciamis. Meski sebenarnya suara dan juga aspirasi dari sejumlah masyarakat mempunyai keinginan agar Banjar menjadi daerah otonom, telah muncul jauh – jauh hari sebelum diberlakukan nya Undang-Undang No. 22 Tahun 1999.

Perjalanan historis Banjar sebelum ditingkatkan statusnya menjadi pemerintahan kota, dimulai dengan status nya sebagai Kota Administratif yang dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 54 Tahun 1991 peresmiannya dilaksanakan pada bulan Maret Tahun 1992 dengan dilantiknnya Drs. H. Suyajid (kini sudah almarhum) sebagai walikotatif pertama. Kotif Banjar sekaligus juga merupakan Kota Administratif terakhir d Jawa Barat.²⁹ Sebelum menjadi pemeritahan kota, Pembentukan Kota Administratif Banjar sebenarnya diorientasikan sejak dulu, dimulai pada tahun 1985 ketika Banjar masih dalam status Kecamatan Banjar. Selanjutnya pemerintahan Daerah Tingkat I Jawa Barat melalui Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat No. 031 tahun 1990 tentang pola induk pengembangan wilayah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat dalam jangka panjang, (25-30 tahun), telah mengambil sebuah kebijakan untuk menata daerah otonom tingkat II yang ada pada wilayah administratif Provinsi Jawa Barat yang dilbur menjadi 42 daerah otonom tingkat II,

²⁸ Sudantako, Djoko. (2003). *Dilema Otonomi Daerah*. Jakarta: Rineka Cipta. hlm 25

²⁹ Fani Febrinia Salindri (2017). *Perkembangan Kota Banjar Tahun 2004-2014*. Universitas Pendidikan Indonesia. hlm 1–9.

salah satu yang telah direncanakan adalah wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar.

Berikut ini merupakan beberapa wilayah yang masuk ke dalam daerah Kota Administratif Banjar :

Tabel 2.3 Luas wilayah Kecamatan di Kota Administratif Banjar

No	Kecamatan	Luas Wilayah (Ha)
1.	Kecamatan Banjar	2.468
2.	Kecamatan Purwaharja	1.634
3.	Kecamatan Pataruman	3.890
4.	Kecamatan Langensari	3.358

Sumber :

Laporan utama hasil kajian pembentukan daerah Kota Banjar, Lab Sosiologi Universitas Indonesia:2001

Dalam RIK (Rencana Induk Kotif) kebijakan perwilayahan digariskan ke dalam sebuah pola dasar pembangunan Daerah Tingkat II Ciamis yang terbagi ke dalam 4 wilayah pembangunan (WP). Dalam struktur hierarki kota, Kota Administratif Banjar ini merupakan pusat (orde) 1 sub pusat pengembangan Banjar. Dalam RIK ini juga disusun sebuah konsep dan juga rancangan mengenai pengembangan Kabupaten Daerah Tingkat II Ciamis. Pada konsep pertama Kabupaten Dati II Ciamis dimekarkan menjadi dua, yaitu Kabupaten Daerah Tingkat II Ciamis dan Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar. Sedangkan pada konsep yang kedua, Kabupaten Ciamis dimekarkan menjadi tiga yaitu; Kabupaten Daerah Tingkat II Ciamis, Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar, dan yang terakhir adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Pangandaran.

Lalu menurut hasil kajian dari sebuah panitia khusus yang ada di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ciamis, pada saat itu dengan akhirnya berujung pada diterbitkannya Surat Keputusan DPRD Ciamis No. 188.4/Kep/DPRD-10/2001 tertanggal 9 Maret 2001 mengenai bentuk persetujuan dari Pemerintah Kabupaten Ciamis terkait pengkajian Kota Administratif Banjar untuk peningkatan status yang ditandatangani Ketua DPRD Ciamis saat itu Drs. H. Hasan Mumu. Kemudian disusul kembali dengan diterbitkannya Surat No.

135/720-Pem tertanggal 17 Mei 2001 yang ditandatangani Bupati Oma Sasmita dengan mengajukan sebuah usulan yaitu terkait peningkatan status Kotif Banjar kepada Gubernur Jawa Barat dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah, Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat, dan Ketua DPRD Kabupaten Ciamis.

Surat itu kemudian ditindaklanjuti dengan dibentuknya sebuah Panitia Khusus dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jawa Barat untuk segera melakukan kajian terhadap Banjar yang pada saat itu diketuai oleh Rizal Fadillah dari Komisi A, bersama tim terjun langsung untuk melakukan kajian secara menyeluruh. Hasilnya, pada saat yang bersamaan pula dengan tertanggal 14 Juni 2001 Gubernur Jawa Barat R. Nuriana menandatangani surat no. 135/1502/Des serta surat keputusan DPRD Jawa Barat No. 135/Kep.DPRD-27/2001 yang ditandatangani oleh Ketua DPRD Jawa Barat Eka Santosa sama – sama menyatakan persetujuannya yaitu terkait peningkatan status Kotif Banjar menjadi Kota Banjar

Pasca diterbitkannya surat dari Gubernur Jawa Barat dan Ketua DPRD Jawa Barat, Departemen Dalam Negeri menunjuk sebuah tim independen dari pihak akademisi yaitu dari Laboratorium Sosiologi Fakultas Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia yang dipimpin oleh Dr. Aviliani guna mengkaji seberapa baik kelayakan penngkatan status menjadi Kota/Kabupaten untuk Kota Adminstratif Banjar ini. Pada saat itu diawali dengan sebuah pemaparan dari Bupati Ciamis Oma Sasmita dan Presidium Forum Peningkatan Status Kotif Banjar (FPSKB) serta sejumlah tokoh masyarakat Banjar yang pada sat itu dilaksanakan di sebuah Hotel yang bertempat di Jakarta mulai 27 sampai 29 Juni 2001, serta setelah melakukan kajian dan juga penelitian akhirnya dikeluarkanlah pernyataan bahwa Banjar telah lulus dan bisa ditingkatkan menjadi kota.

Berikut merupakan perbandingan skor Calon Daerah Kota Banjar dan Kabupaten Induk Ciamis dengan skor minimal kelulusan. Data di bawah ini merupakan hasil riset dan penelitian dari tim independen Fakultas Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia :

Tabel 2.4 Hasil survei independen dari Fakultas Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia

No	Indikator	Skor Minimal Kelulusan	Skor Kota Baru Yang Akan Dibentuk		Skor Kabupaten Induk Yang Akan Ditinggal		Lulus / Tidak Lulus
1.	Kemampuan Ekonomi	450	450	Sama	450	Sama	
2.	Potensi Daerah	1380	1880	Diatas	1640	Diatas	
	Sosial Budaya	120	160	Diatas	130	Diatas	
	Sosial Politik	60	80	Diatas	70	Diatas	
	Jumlah Penduduk	105	150	Diatas	150	Diatas	
	Luas Daerah	90	60	Dibawah	120	Diatas	
	Lain – Lain	75	60	Dibawah	70	Dibawah	
	Total	2280	2840	Diatas	2630	Diatas	LULUS

Sumber :

Laporan Utama Hasil Kajian Pembentukan Daerah Kota Banjar
Lab Sosiologi Fisip Universitas Indonesia 2001

Dalam data tabel tersebut, sebagian besar nilai skor yang telah ditetapkan dari pemerintah sudah melewati ambang batas yang telah ditetapkan. Seperti potensi daerah, sosial budaya, sosial politik, jumlah penduduk. Namun skor seperti luas daerah, dan juga kemampuan ekonomi skor nya masih di bawah dan sama. Dari skor tersebut kemudian Kota Administratif Banjar ini telah dinyatakan lulus bersama dengan 14 daerah lainnya. Kemudian dari Departemen Dalam Negeri dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia membentuk sebuah Panitia Kerja (Panja), yang terdiri dari Komisi II dengan menunjuk Agun Gunanjar sebagai ketua tim kecil Rancangan Undang-Undang Kota Banjar. Bersamaan itu pula dilakukan sosialisasi kepada masyarakat dilakukan dengan gencar ke berbagai wilayah Banjar juga melibatkan seluruh forum, yang terdiri dari Presidium, Sekretariat, Anggota Forum dan Kotif Banjar, dengan menamakan diri sebagai Tim Banjar yang terdiri dari empat tim. Tim Banjar 1 beranggotakan Drs. H. Yusuf Siddieq, S.H, H. Uding K,BBA, Her Her Rohilin, S.T, dan Pelaksana harian Walikota Administratif Dahlan S.H, dengan menggarap Desa Banjar, Neglasari, Mekarharja, Binangun, Bojongkantong, dan Rejasari. Tim 2 beranggotakan Dr. dr. H. Herman Sutrisno MM, K.H Ade Efendi, Andi Hermawan; Billy Subagyo, dan pelaksana harian

Sekretaris Kotif Banjar Drs. H. Endang Hendra, yang menggarap Desa Balokang, Situbatu, Raharja, Mulyasari, Muktisari, dan Waringinsari.

Kemudian Tim Banjar 3 yang beranggotakan H.M Wahyu Sukmara, K.H Ridwan Mansur, Solihin, Yogi Indrijadi, S.H, dan Drs Yoyo Suharyono dari Kotif Banjar, menggarap Desa Langensari. Terakhir Tim Banjar 4 beranggotakan K.H Muin Abdurrohiem, Entjang R, Sobur Waluyo, S.Pd, Sulyanati, dan Dadi Haryadi dari Kotif Banjar, dengan target sosialisasi ke sejumlah tempat serta berbagai kegiatan yang dilaksanakan, termasuk dalam acara-acara yaitu hiburan dan juga kegiatan lainnya pun dijadikan sebagai sebuah kesempatan bagi seluruh tim untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat Banjar.³⁰

Hingga pada akhirnya dukungan mulai berdatangan dari sejumlah elemen Masyarakat dan partai politik, meski ada pula elemen masyarakat yang melakukan penolakan dengan berbagai alasan seperti sikap pesimistis jika Banjar jadi melakukan pemekaran dari wilayah Kabupaten Ciamis dan merubah status nya dari Kota Administratif menjadi Kota Banjar. Namun hal tersebut tidak menjadi kendala berarti karena kerasnya perjuangan dari Presidum Forum dan Forum Peningkatan Status Kota Banjar melakukan lobi politik baik secara personal ataupun melalui kelembagaan, dan ternyata hal tersebut dapat meyakinkan dari pihak Pemerintah Pusat.

Akhir dari seluruh proses administrasi terkait pembentukan Kota Banjar ini adalah laporan hasil pelaksanaan sidang di Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah dan penyampaian penulisan 2 (dua) Rancangan Undang-Undang Pembentukan Daerah Otonom yang ditandatangani oleh Menteri Dalam Negeri saat itu Hari Sabarno yang ditujukan kepada Presiden Republik Indonesia Megawati Soekarno Putri dengan tembusan Sekretaris Kabinet, surat ini sendiri bernomor: 118/1824/SJ tertanggal 20 Agustus 2002. Tindak lanjut surat dari Menteri Dalam Negeri, Presiden Republik Indonesia Megawati Soekarno Putri mengeluarkan Surat Ampres (Amanat Presiden) dengan nomor surat R.11/PU/IX/2002 tanggal 30 September 2002 perihal dua Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang

³⁰ Undang Sudrajat, *Banjar Satu Dekade Resep Manjur Kepemimpinan Dokter Herman* (Garut: YAF Publish), hlm 17.

pembentukan 15 Daerah Otonom. Ampres tersebut ditujukan kepada Pimpinan DPR RI dengan tembusan Wakil Presiden, Menteri Koordinator Politik Keamanan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, dan Menteri Hak Asasi Manusia.

Akhirnya hari yang ditunggu oleh seluruh lapisan masyarakat Kota Banjar tiba, tepat di hari selasa tanggal 12 November 2002 dalam sebuah sidang paripurna ke-12 DPR RI dengan agenda Pengesahan Rancangan Undang-Undang Pemerintah Kota Banjar, sembilan fraksi yang ada di DPR RI menyetujui peningkatan status Banjar, yang kemudian di tanggal 21 Februari 2003 Menteri Dalam Negeri Hari Sabarno meresmikan peningkatan Status Kota Administratif menjadi Kota Banjar dengan Undang-Undang No. 27 Tahun 2002 dan melantik pejabat sementara walikota Banjar H.M. Effendi Taufikurahman, S.H, M.H., yang dihadiri Gubernur Jawa Barat R Nuriana, Ketua DPRD Jawa Barat Eka Santosa, serta anggota DPR RI Drs. Agun Gunanjar Sudarsa, Drs. H. Chozin Chumaidy, Endang Karman, kemudian Bupati Ciamis Oma Sasmita beserta sejumlah pejabat lainnya yang ada di wilayah naungan Pemerintah Kabupaten Ciamis.